

## Ketua STIE Ahmad Dahlan Paparkan Penyebab Ketimpangan Ekonomi Indonesia

Jum'at, 21-07-2017

**MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA** – Mencermati ketimpangan ekonomi Indonesia yang stagnan dari tahun 2016 sampai dengan 2017, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan (STIEAD) Jakarta, Mukhaer Pakkanna menyebutkan ada empat point penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi Indonesia stagnan di angka gini rasio 3,93.

Penyebab pertama adalah inflasi Indonesia yang rendah ternyata diikuti dengan daya beli yang rendah pula.

“Daya beli masyarakat terpukul akibat kenaikan harga yang diatur pemerintah. Sifatnya lebih struktural dan administratif. Kenaikan tarif listrik dalam dua tahun berturut-turut secara akumulatif memukul daya beli rakyat. Klimaksnya pada semester satu 2017, rakyat kelabakan dalam berbelanja. Itulah yang mengonfirmasi kenapa inflasi rendah selama satu semester. Tapi, inflasi rendah tidak selamanya positif jika diiringi daya beli yang jatuh,” ujar Mukhaer berdasarkan rilis yang diterima redaksi pada Jumat (21/7).

Penyebab kedua, lanjut Mukhaer ialah ketimpangan ekonomi yang terjadi lebih disebabkan karena faktor struktural. Sejatinya jika dibanding ketimpangan ekonomi 1990-2000 jauh lebih rendah dibanding 2000-2016. Itu artinya, angin reformasi yang bergulir sejak 1998 hingga sekarang tidak membuat masyarakat makin sejahtera.

“Saat ini justru, yang kaya makin kaya dan miskin makin miskin. Yang kaya makin disupport oleh elite politik yang berkuasa. Justru yang ikut kaya adalah partai politik (parpol) yang berkuasa. Artinya, ketimpangan yang terjadi selama satu dasawarsa ini lebih disebabkan faktor structural,” jelasnya.

Faktor kekuasaan politik yang memberi privilese ke kelompok pemilik modal. Mengapa mereka diberi privilese? Mukhaer menyebutkan karena supply dana parpol berasal dari pemilik modal. “Terjadinya simbiosis mutualisme antara penguasa politik dan penguasa modal. Itulah penyebab akar ketimpangan,” jelasnya.

Mukhaer juga menegaskan bahwa Indonesia harus segera melakukan reposisi pada sistem perpolitikannya yang dianggap sebagai penyebab adanya persoalan-persoalan ekonomi.

“Solusinya apa? Rombak format politik. Kembalikan pada posisi sistem presidensial. Selama ini format sistem politik kita gado-gado dan *ngaco*,” tegasnya.

Selain itu, Ia juga menyarankan perlu adanya regulasi untuk membatasi penguasaan aset dan kekayaan pemilik modal raksasa.

“Perlu kebijakan *affirmative action* dengan membuat model *partnership* antara pemilik modal raksasa dengan rakyat dalam posisi yang sama, tidak dalam posisi subordinat. Pemilik modal jangan melihat rakyat dalam posisi yang *given* tapi harus dilihat dalam yang bisa diubah. Karena itu kebijakan pemilik modal tidak semata *charity*,” pungkasnya.

**Sumber: Suparman/Humas dan Media Officer STIEAD**